

DIALOG KEBUDAYAAN MENUJU KO-EKSISTENSI DAMAI ANTARPERADABAN¹

BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO*

Abstract: Culture is the totality of the human expression towards realization of itself individually and collectively and has always been a platform for humans to achieve life ideals. As culture cannot escape its temporal and spatial circumstances there exists the plurality of cultures and the ensuing relativity of values. These dynamics have led humankind to become entrapped in Huntington's "conflict of civilizations" i.e. a conflict of values. The world of the early 21st century is dominated by "Western civilization," the "Sinic civilization" and increasingly by "Islamic civilization." Although language and technology have brought humans closer to each other, language and technology will also become the basis of the economic performance of nations, cultures, and civilizations. Civilizations tend to be competitive, and competitive civilizations tend to become domination if not imperialism, and are prone to setting their own absolute standards for the rest of the world, thereby potentially contributing to perennial global tensions and violent eruptions. The depletion of natural resources will only make things worse unless humankind develops a mode of peaceful co-existence among civilizations. This *modus vivendi* will only become possible if world leaders in politics, religion and economics can develop a consensus based on trust and tolerance.

Keywords: Culture, civilization, plurality, value, relativity, absolutism, imperialism, dialogue, justice, co-existence

* Budiono Kusumohamidjojo, Centre for European Studies (Pusat Kajian Eropa), PAU ISIP Building 1st Floor, Kampus Universitas Indonesia, Depok. Telp. 021-7873105. E-mail: budikoesoemo@gmail.com.

1 Artikel ini aslinya pernah dipresentasikan dengan judul "Dialog Kebudayaan Menuju Ko-Eksistensi Damai Peradaban" pada *Extension Course Filsafat (ECF) "Evolusi Peradaban,"* yang diselenggarakan oleh Fakultas Filsafat, Universitas Parahyangan, Bandung, pada 26 November 2010. Artikel ini telah direvisi untuk diterbitkan.

Abstrak: Kebudayaan adalah totalitas ekspresi manusiawi menuju perwujudan dirinya baik secara individual maupun kolektif, dan selalu merupakan “tempat” (*platform*) untuk mencapai cita-cita hidupnya. Selama kebudayaan tidak dapat menghindarkan diri dari lingkup ruang dan waktu, selalu akan muncul pluralitas budaya serta relativitas nilai-nilai. Dinamika ini telah membawa umat manusia terkurung dalam apa yang disebut oleh Huntington sebagai “konflik peradaban-peradaban,” yakni, konflik nilai-nilai. Dunia abad ke-21 didominasi oleh “peradaban Barat,” peradaban Sinik, dan peradaban Islam. Kendati bahasa dan teknologi telah membuat manusia menjadi lebih dekat satu sama lain, bahasa dan teknologi juga akan menjadi landasan bagi citra ekonomi dari berbagai bangsa, kebudayaan-kebudayaan, dan peradaban-peradaban. Peradaban cenderung kompetitif, dan peradaban yang kompetitif cenderung kompetitif, dan peradaban yang kompetitif cenderung menjadi sebuah dominasi, bahkan dapat menjadi imperialisme. Akibatnya, mereka mudah tergelincir untuk mencipkakan standar mereka yang abolut dan menerapkannya bagi seluruh dunia; karenanya, secara potensial menyumbang bagi munculnya ketegangan-ketegangan dan ledakan-ledakan kekerasan global yang perenial. Berkurangnya sumber-sumber alam hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk, kecuali bila manusia mengembangkan sebuah moda ko-eksistensi damai antarperadaban. Cara hidup (*modus vivendi*) seperti ini hanya dimungkinkan bila para pemimpin dunia di bidang politik, agama, dan ekonomi dapat mengembangkan sebuah konsensus berdasarkan kepercayaan dan toleransi.

Kata-kata Kunci: Kebudayaan, peradaban, pluralitas, nilai, relativitas, absolutisme, imperialisme, dialog, keadilan, ko-eksistensi.

PENDAHULUAN

Semula penulis diminta untuk membahas tema “Mungkinkah Rekayasa Budaya demi Peradaban yang Lebih Baik?” Jawaban untuk pertanyaan itu dapat sederhana. Jika kebudayaan dapat direkayasa,

maka mudah saja peradaban “diperbaiki.” Sebaliknya, jika kebudayaan tidak dapat direkayasa, peradaban juga akan berlangsung dan berevolusi dengan sendirinya seperti telah terjadi selama ini. Namun terus terang, penulis memandang judul itu agak naif, sehingga penulis memutuskan untuk membahas tema seperti yang penulis rumuskan sekarang karena tiga alasan utama.

Pertama, dalam proses kebudayaan memang ada banyak terjadi rekayasa – misalnya fenomena *discovery* dan *invention* – apalagi di zaman berkuasanya teknologi. Kendati begitu, kebudayaan itu berlangsung sebagian besar di bawah kesadaran manusia dan tidak semua aspeknya dapat direkayasa. Ibu yang menangis karena anaknya sakit keras bukanlah rekayasa, meski merupakan salah satu ekspresi kebudayaan.

Kedua, karena peradaban itu merupakan *crème de la crème* kebudayaan yang mandiri, substansinya selalu memang menjadi lebih baik, kendati prosesnya tidak linear melainkan acap kali maju mundur. Belum lagi kita tidak dapat melihat proses itu terlepas dari kesepahaman yang bagaimana yang dapat kita miliki mengenai apa yang “baik.”

Ketiga, daripada berbicara mengenai *Selbstverständlichkeit* (perkara yang dengan sendirinya) itu, penulis ingin supaya kita menyadari bahwa dalam kenyataan kita sedang menuju konflik besar yang dampaknya lebih global daripada Perang Dunia II. Untuk membahas persoalan ini penulis akan menggunakan “kebudayaan” dan “peradaban” sebagai konsep yang universal maupun sebagai pemahaman (*notion*) yang individual dalam hubungannya dengan komunitas-komunitas individual pendukungnya.

KEBUDAYAAN, PLURALITAS, DAN RELATIVITAS

Penulis percaya bahwa sebelum kajian ini, pengertian mengenai “kebudayaan” – baik sebagai konsep yang universal maupun pemahaman individual – telah dibahas dan dijelaskan dengan berbagai cara. Penulis ingin melakukan konfirmasi yang sederhana mengenai pengertian konsep ini yang sarat dengan makna. Seperti yang penulis kemukakan dalam buku penulis,² penulis memahami kebudayaan sebagai keseluruhan ekspresi manusia dalam menjalankan realisasi dirinya. Kebudayaan itu

unik bagi makhluk terunggul yang kita kenal selama ini di jagad raya, yang oleh Aristoteles (384-322 sM) disebut sebagai makhluk yang bukan hewan maupun malaikat. Kebudayaan adalah suatu konsep universal yang melekat pada manusia yang merupakan individu maupun kolektif sekaligus. Dengan begitu orang melakukan kebodohan jika masih meletakkan preferensi kemanusiaan pada individu atau kolektif saja.

Kendati demikian, realisasi diri manusia sebagai individu maupun kolektif selalu berlangsung dalam suatu *Lebenswelt* (dunia kehidupan empiris) seperti yang dipahami oleh Edmund Husserl (1859-1938) sang pelopor fenomenologi, yang karena itu juga selalu terpaut dengan dimensi ruang dan waktu yang distingtif. Itulah sebabnya, kendati umat manusia sebagai keseluruhan itu berkebudayaan, berbagai komunitas manusia juga menjalankan realisasi diri secara berbeda, terutama karena ia memang harus merespon lingkungan habitatnya dengan pencerdasan yang berbeda-beda juga. Distingsi empiris yang pertama tetapi mendasar itu pada giliran berikutnya terjahit dalam proses mental-historis yang kerap kali diawali secara hipotetis dengan *mythos* yang selanjutnya berkelana dalam dunia nilai untuk pada akhirnya mendarat pada tataran kepercayaan di mana orang kerap kali tidak mau berkompromi. Akibat yang tidak terhindarkan adalah kita lantas mengenal berbagai kebudayaan di dunia ini. Pemahaman mengenai pluralitas kebudayaan ini bukanlah cerita baru, meski persoalan yang ditimbulkannya tak kunjung teratasi.

Kebudayaan itu dalam realisasinya menjadi seperti “pabrik” yang menghasilkan aneka produk, tidak saja mulai dari yang sangat *subtil* dan halus seperti kepercayaan atau ilmu matematika, tetapi juga spektakuler seperti piramida Mesir atau Tembok Besar Tiongkok dan penjelajahan ruang angkasa, atau pembedahan jantung bayi selagi masih dalam kandungan ibunya, sampai kepada yang gila seperti Perang Dunia dan genosida. Salah satu produk terpenting dari kebudayaan dan yang sekaligus merupakan problem yang paling rumit dan kontro-versial adalah apa yang kita kenal sebagai “nilai” (*value*), yaitu sesuatu yang cenderung

2 Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009).

dipandang baik, tinggi, dan dianggap sebagai pantas dikejar, dihormati, dan diperjuangkan untuk diwujudkan. Dalam praksis kebudayaan, nilai itu tidak saja melibatkan nalar sebagai kapasitas utama yang menghasilkan *e-valua-tion* sebagai sistem pembuatan keputusan hidup, melainkan juga segala kapasitas manusia yang nir-nalar seperti emosi, *mythos*, serta bentuknya yang lebih canggih sebagai religi, dan bahkan segala macam persepsi (yang tidak selalu logis) dan preferensi estetik.

Kebudayaan yang merupakan proses realisasi hidup manusia itu untuk sebagian besar lantas mencakup dua perkara utama. Pertama, *survive* dan mempertahankan manusia sebagai ras yang tidak terlalu terikat pada naluri. Kedua, perjuangan untuk mewujudkan nilai yang pada akhirnya merupakan cermin dari tujuan hidupnya. Tentu saja nilai itu kemudian memperoleh pangkat yang aneka warna, mulai dari yang sangat rasional sehingga dijadikan hukum yang berlaku untuk semua warga negara, sampai kepada yang sangat tidak rasional namun tetap saja relevan sebagai bagian dari eksistensi manusia. Persoalannya adalah, karena rumpun-rumpun kebudayaan itu terjadi sebagai akibat dari keterikatan ruang dan waktu, tatanan nilai yang dihasilkannya juga menjadi beraneka ragam yang antara lain menghasilkan persoalan relativitas nilai yang sering dikecam tetapi tidak dapat dibantah sebagai kenyataan. Sebenarnya perbantahan mengenai nilai itulah yang menjadi biang kerok dari pertikaian peradaban atau yang dipopulerkan oleh Samuel Huntington sebagai "*conflict of civilizations*" dan sekarang menjadi berkecamuk.

PERADABAN DAN KEUNGGULAN

Jika urusan merumuskan apa itu "kebudayaan" seringkali menjadi proyek yang tidak kunjung selesai, maka pengertian "peradaban" lebih membingungkan lagi. Meskipun demikian, intinya dapat disederhanakan begini: semua peradaban mengandung atau berpangkal pada kebudayaan, tetapi tidak semua kebudayaan bermuara pada peradaban. Semua komunitas manusia yang pernah atau masih ada dalam sejarah pastilah menghasilkan kebudayaan, tetapi hanya sedikit di antaranya yang menghasilkan peradaban. Di balik keeratan kaitannya dengan kebudayaan,

peradaban dapat dipandang sebagai adibu-daya, sebagai suatu kompleks kebudayaan yang sedemikian unggul, sehingga dapat berlangsung secara relatif independen dari berbagai rumpun kebudayaan lainnya. Peradaban merupakan adi-budaya yang unggul dan independen karena memang menghimpun segala prestasi unggul manusia pendukungnya dalam merealisasi hidupnya: mulai dari prestasi ilmu pengetahuan, prestasi ekonomi dan industri, prestasi organisasi sosial dan politik yang canggih, sampai kepada perpaduan nilai dalam suatu konsensus sosial yang mengintegrasikan sekelompok manusia, yang secara bersama mampu menghasilkan perpaduan sebagai apa yang sampai sekarang dikenal sebagai "kekuatan dunia."

Peradaban mempunyai dua persamaan utama dengan kebudayaan. Pertama, baik suatu kebudayaan maupun suatu peradaban mempunyai tendensi perenial untuk berkembang progresif dan menjadi lebih kompleks.³ Kedua, baik suatu kebudayaan maupun suatu peradaban itu dapat sirna, jika gagal untuk menanggapi tantangan yang lahir dari kompleksitas internal sosio-politiknya sendiri. Sejarah memang mengenal komunitas-komunitas manusia yang punah karena disapu oleh bencana alam hebat yang berkepanjangan, tetapi kebudayaan-kebudayaan atau peradaban-peradaban pada umumnya runtuh karena perseteruan internal dan disintegrasi sosial yang terminal seperti yang utamanya diperlihatkan oleh runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat (abad ke-5 M). Selain dari itu, kebudayaan yang dapat terus berkembang akan menjadi peradaban, sedangkan peradaban yang terus berkembang mempunyai kemungkinan untuk menjadi kekuatan dunia.

Sejarah umat manusia memang mengenal beberapa peradaban seperti itu, seperti misalnya peradaban Maya dan Inca di Amerika Selatan, serta Mesir di Afrika Utara, yang semuanya boleh dikata sebagai tinggal sejarah belaka. Di samping itu kita kenal juga peradaban Yunani yang kemudian diambil alih dalam peradaban Romawi, yang berbagai kinerja ilmu pengetahuan dan filsafatnya sekarang diambil alih dalam apa yang dikenal sebagai peradaban "Barat" yang sangat nalar dan teknologi

3 Catatan: lebih "kompleks" memang belum tentu lebih "baik."

sentris. Akhirnya kita harus menyebut dua peradaban lagi yang lahir dalam sejarah, dan masih berlanjut sampai sekarang. Pertama, peradaban Tiongkok yang sudah berusia historis tiga ribu tahunan. Kedua, peradaban Islam yang lahir pada abad ke-7 M. Jadi dunia kita sekarang secara strategis sebenarnya dikendalikan oleh ketiga peradaban itu.

TUMPUAN PERADABAN

Setiap kebudayaan memerlukan tumpuan-tumpuan tertentu untuk dapat bertahan dan berkembang menjadi peradaban, dan jika sudah menjadi peradaban, untuk lanjut berkembang menjadi kekuatan dunia. Samuel Huntington (1927-2008) dalam bukunya⁴ menyebutkan lima pilar sebagai tumpuan dari peradaban. Pertama adalah faktor demografi atau penduduk. Menurutnya, betapa pun hebatnya kinerja dari suatu komunitas, ia tidak dapat membangun peradaban jika jumlah penduduknya terlalu terbatas. Menurut penulis asumsi Huntington ini mengandung kelemahan empiris. Ketika kota Athena menghasilkan penemuan-penemuan dasar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar abad ke-5 sampai ke-3 sM, penduduknya hanya berjumlah sekitar tiga ratus ribu orang.⁵ Sekarang ini, negara-negara Skandinavia dan Swiss yang tergolong sebagai negara-negara yang menampilkan kualitas hidup terbaik, rata-rata berpenduduk sedikit, yang total semuanya tidak mencapai dua puluh juta orang.⁶ Jadi yang relevan dari faktor demografi adalah kualitas penduduknya, dan bukan jumlahnya. Penduduk yang berlimpah tetapi miskin dan bodoh (apalagi jika malas juga) hanya merupakan beban dan bukan aset nasional.

Faktor kedua yang disebutkannya adalah bahasa, terutama karena bahasa merupakan wahana utama bagi suatu komunitas manusia untuk membangun konsensus guna pada giliran berikutnya membuat keputusan-keputusan yang konvergen untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Kendati begitu, Huntington juga mengakui bahwa di zaman modern, bahasa tidak lagi merupakan hambatan peradaban. Ia, misalnya,

⁴ Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996).

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Athenian_democracy. Diakses pada 30 Maret 2011.

⁶ *Newsweek*, 23-30 August 2010.

menunjuk Swiss yang menggunakan empat bahasa resmi, tetapi mampu menghasilkan perusahaan-perusahaan berkinerja dunia di bidang teknologi, pangan, farmasi, dan keuangan yang tidak dapat dipandang ringan bahkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang.

Faktor ketiga yang ditunjukkannya adalah teknologi. Ia mengindikasikan bahwa kolonialisme yang merambah dunia mulai abad ke-17 bersandar pada temuan-temuan baru di bidang teknologi, yang pada gilirannya merupakan produk dari kebangkitan zaman *Renaissance*. Jadi pangkalnya adalah sains dan teknologi. Huntington luput untuk mengakui bahwa peradaban Inca dan Mesir, atau Tiongkok dan Islam juga banyak bertumpu pada sains dan teknologi. Candi-candi Maya dan Inca, serta piramida Mesir yang didorong motivasi imortalitas kekuasaan, atau Tembok Besar Tiongkok yang didorong motivasi pertahanan dan sistem kanal yang bermotivasi ekonomi dan dibangun di Provinsi Sichuan oleh Kaisar Qín Shi Huángdì pada abad ke-2 sM, semuanya bersandar pada utamanya matematika, fisika, dan mekanika.

Faktor keempat adalah kinerja ekonomi. Faktor ini sukar disangkal sebagai pilar utama peradaban. Komunitas manusia mana pun akan sukar bertahan dan apalagi berkembang jika tidak mempunyai kinerja ekonomi yang unggul. Komunitas itu akan tinggal miskin, kalau bukannya kelaparan, jangankan lagi mampu bertahan terhadap serangan dari komunitas lain. Tidak pernah bangsa-bangsa yang berkuasa adalah sekaligus bangsa yang miskin, sama juga seperti tidak ada peradaban yang didukung oleh bangsa yang miskin. Kendati demikian, dalam kurun waktu yang sama Francis Fukuyama mengutarakan bahwa kinerja ekonomi itu sebetulnya merupakan kinerja kebudayaan.⁷

Faktor kelima dan yang menentukan untuk zaman kita adalah agama. Faktor kelima dari Huntington ini tidak selalu absah. Kendati peradaban Maya, Inca, dan Mesir dan bahkan juga Yunani dan Romawi tidak mengenal pluralitas agama, agama atau kepercayaan dalam peradaban-peradaban itu terintegrasi dalam kekuasaan, sehingga tidak menjadi penghalang dalam proses pembuatan keputusan-keputusan besar. Meski demikian,

Huntington memang melihat relevansi agama yang semakin besar dalam kerangka konflik di zaman kita. Ia misalnya, menunjuk Perang Tiga Puluh Tahun (berakhir pada 1648) yang utamanya melibatkan bangsa-bangsa yang berinduk bahasa Jerman, yang pecah karena konflik Protestantisme. Atau saling bantai yang terjadi di Libanon, atau India/Pakistan, dan kawasan Balkan dalam dekade terakhir abad ke-20, yang dimotivasi oleh permusuhan antarpenganut agama.⁸ Huntington melihat faktor agama sebagai persoalan besar dalam hubungan antara peradaban Barat yang berwarna Kristiani dan peradaban Islam, selagi ia tidak melihat peradaban Sinik sebagai pemasalah, karena peradaban Sinik memang dikenal sebagai peradaban yang ideosinkretik sehingga jauh dari pertengkaran mengenai absolutisme metafisik.

PERADABAN DAN IMPERIALISME

Jika kita memahami peradaban sebagai *crème de la crème* kebudayaan, akan menjadi tidak terhindarkan untuk juga mengintip soal kekuasaan dalam kerangka peradaban. Peradaban itu pangkatnya saja sudah adi budaya yang relatif independen dari kebudayaan lain, sehingga tidak mungkin kita hanya membayangkan manusia yang memikirkan konsep-konsep seperti “peradaban yang lebih adil” atau “peradaban yang lebih baik,” apalagi karena konsep “adil” dan konsep “baik” itu sendiri tidak pernah steril dari kontroversi dan perdebatan. Karena kelebihan-kelebihannya, peradaban itu sangat boleh dianalogikan sebagai waduk yang air kekuasaannya berlimpah dan akan mengalir (jika sopan) merambahi tempat-tempat yang lebih rendah atau menerjang (jika tidak sopan) tempat-tempat yang kekurangan air maupun yang sudah ada airnya. Di antara banyak kelebihanannya, kekuasaan boleh dibilang merupakan bagian yang substantif dari peradaban, yang karena itu juga lumayan sukar untuk dipandang terpisah dari imperialisme.

Istilah “imperialisme” berasal dari bahasa Latin *imperare*, artinya

7 Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (New York: Simon & Schuster, 1996).

8 Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations*, p. 42.

menguasai, dan mula-mula memang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menamai negara mereka *Imperium Romanum*, Kekuasaan Romawi. Namun baru pada abad ke-19 imperialisme mendapatkan mua-tan baru sebagai ideologi dari John Gallagher dan Ronald Robinson,⁹ tetapi tetap saja tidak jauh dari konotasi kekuasaan dan dominasi. Huntington juga tidak menyangkal lekatnya imperialisme pada peradaban, lebih-lebih karena diakuinya bahwa peradaban itu pada akhirnya merupakan kulminasi dan sublimasi dari kebudayaan yang unggul dan mandiri serta dengan sendirinya sarat dengan potensi untuk memaksa-kan dominasi. Huntington tidaklah sendirian dalam menengarai bahwa peradaban cenderung ramah dengan imperialisme, khususnya imperialisme Amerika Serikat.¹⁰ Jagoan lain yang sependangan adalah Noam Chomsky (1928-...). Konstataasi Huntington itu tidak pelak lagi meng-hasilkan segregasi rumpun-rumpun kebudayaan dan peradaban, yang celaknya secara tidak sadar (tetapi tidak jarang juga sadar betulan) memang digelontorkan oleh orang-orang yang sedang paling berkuasa dalam sejarah dunia ini. Dengan cara begitu fakta memang seperti ditegakkan lewat definisi dan bukan oleh kognisi, betapa pun dapat melesetnya definisi itu. Berkaitan dengan hal ini Michel Foucault (1926-1984) pernah mengatakan bahwa kebenaran itu dibuat dan bukannya dicari – dapat juga dicari-cari – seperti yang diyakini oleh Sokrates dua puluh lima abad yang lalu.¹¹ Artinya, dalam kerangka Huntington, peradaban dan definisi itu dapat kita kotak-kotakan, dan tidak jarang sebatas stereotip dan kemalasan kita sendiri.¹²

Juga di zaman kita, kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah imperialisme yang cenderung inheren dalam peradaban, meski konstataasi itu sering disangkal dan tesis dari Huntington justru dituduh sebagai mengada-ada. Namun empirinya adalah apa yang kita saksikan, dan kadang-kadang harus kita alami juga, memang memperlihatkan bahwa ada yang tidak beres dalam hubungan antarperadaban sekarang seperti

9 <http://en.wikipedia.org/wiki/Imperialism>. Diakses pada 30 Maret 2011.

10 Roland Robertson, "Civilization," In *Theory, Culture & Society*. Volume 23 (London: Sage Publications, 2006): pp. 422-423; Chen Kuan-Hsing, "Civilizationalism," in *Theory, Culture & Society*. Volume 23, pp. 427-428.

yang bermuara dalam tataran hubungan internasional serta keamanan dunia. Huntington menerbitkan bukunya pada 1996, sedangkan Presiden Bill Clinton (menjabat 1993-2001) sudah mulai menangani teror pem-boman terhadap *World Trade Center* di New York pada awal masa jabatannya. Persis sehari setelah Hari Raya Idul Fitri 10 September 2010, ketika mengenang tahun ke-9 dari peristiwa 9/11 pada 11 September 2010, Presiden Barack Obama merasa perlu menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berperang melawan Islam. Lantas, bertanyalah kita yang sederhana ini: "Kalau begitu, sebetulnya siapa berperang melawan siapa sekarang ini?"

PERADABAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jika boleh meminjam lagi logika Foucault, jawaban yang benar atas pertanyaan itu adalah masalah persepsi, yaitu masalah bagaimana kita membuat jawaban, dan bukannya mencari kebenaran di balik jawaban tersebut. Proses itu jugalah yang terjadi secara sinambung ganti-berganti pada tataran hubungan internasional, utamanya dalam proses globalisasi yang sangat mengandalkan teknologi informasi dan telekomunikasi. Ketika Marco Polo (1254-1324) menempuh perjalanan panjang untuk kemudian bermukim di Dadu (sekarang disebut Beijing) sebagai penasihat dari Kubilai Khan (1215-1294), ia berjumpa dengan peradaban yang sudah lebih dari dua *millennia* panjangnya. Konflik peradaban juga sudah ada, utamanya dalam bentuk penaklukan oleh yang lebih kuat, seperti yang juga dilakukan oleh Kubilai Khan terhadap peradaban Eropa dan peradaban Islam. Sejarah mencatat bahwa tentara Batu Khan (1207-1255), cucu dari Genghis Khan (1162-1227), pernah mencapai gerbang kota Wina dan di waktu yang lain masuk ke kota Baghdad. Forum hubungan internasional

11 Berikut ini posisi Michel Foucault mengenai "truth": "*Truth, is the construct of the political and economic forces that command the majority of the power within the societal web. There is no truly universal truth at all; therefore, the intellectual cannot convey universal truth.*" Dari "Truth and Power," mula-mula berbentuk wawancara dengan Alesandro Fontana dan Pasquale Pasquino yang terbit sebagai artikel "Intervista a Michel Foucault" dalam *Microfisica del Potere*, Turin, 1977. <http://www.wdog.com/rider/writings/foucault.htm>. Diakses pada 30 Maret 2011.

12 Budiono Kusumohamidjojo, "Membangun Peradaban Yang Lebih Adil," Naskah Orasi Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Filsafat Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, nomor 31973/A2.7/K/2006 tanggal 28 Februari 2006, diterbitkan dalam *Melintas* 23 (April 2007): 29-45.

yang lebih diwarnai oleh penaklukan (*conquest*) itu akan berlangsung sampai abad ke-19, yang mengakibatkan bahwa kita juga tidak mengenal masalah ko-eksistensi peradaban di zaman itu, karena yang terjadi adalah penaklukan oleh peradaban yang satu oleh peradaban yang lain. Forum hubungan internasional ketika itu memang juga belum mendapatkan dimensinya seperti yang sekarang, terutama karena dihambat oleh moda komunikasi yang terbatas.

Konflik peradaban pertama pecah dalam Perang Tiga Puluh Tahun tatkala kekuatan Protestan menyerbu kekuatan Katolik. Perang ini diakhiri melalui Perjanjian Westfalia (sekarang wilayah Jerman) pada 1648 yang antara lain mengadopsi doktrin *Cuius regio, eius religio*: di mana orang bermukim, agama sana juga yang dianutnya. Dalam kerangka yang lebih luas Perjanjian Westfalia ikut mendirikan hukum internasional modern dengan mengakhiri monopoli Gereja Katolik dalam domain kenegaraan dan mengimbas lahirnya zaman *Renaissance*, yang pada gilirannya membuka jalan untuk perkembangan teknologi modern. Teknologi modernlah yang mentransformasikan konflik peradaban.

Forum hubungan internasional modern telah menjadi ajang utama dari pertemuan maupun konflik peradaban. Berbagai konflik yang sarat kekerasan dan teror sekadar merupakan letupan realisasi dari kegagalan dalam penyelenggaraan hubungan internasional. Jadi tanggung jawabnya terletak di bahu semua pihak yang menentukan format hubungan internasional sekarang ini. Kegagalan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai forum utama hubungan internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah besar, karenanya harus dilihat sebagai wahana utama yang menggelar konflik peradaban. Salah satunya yang paling tua dan berdampak global dalam sejarah PBB adalah konflik yang berkenaan dengan masalah Palestina.

Perkara ini tidak kunjung selesai tuntas, justru karena ia melibatkan berbagai *mindset* yang bertumpu pada filosofi dan *mythos*, serta keyakinan meta-rasional yang tidak dapat didialogkan. Adalah ilusi belaka, jika orang hendak menyelesaikan konflik meta-rasional pada tataran rasional untuk mencapai konsensus. Karena itu, persoalan Palestina yang terus menjadi risiko perdamaian dunia akan menjadi buntu jika kita berhenti pada tesis

Sigmund Freud (1856-1939) yang mengatakan bahwa orang tidak dapat dipaksa untuk percaya, dan orang juga tidak dapat dipaksa untuk tidak percaya.¹³ Jika boleh meminjam juga tesis Huntington mengenai agama sebagai pilar utama dari peradaban, tesis itu boleh digunakan untuk mengidentifikasi masalah Palestina sebagai pemicu konflik peradaban yang kita alami sekarang. Namun, karena logika manusia mendambakan dunia yang selalu lebih baik, kita lantas juga tidak dapat berhenti pada tesis Freud itu. Kita harus mencari jalan lain menuju ko-eksistensi damai antarperadaban.

Jika kita tidak dapat mengesampingkan pluralitas kebudayaan sebagai kenyataan empiris, zaman modern juga sudah menghadapkan kita pada masalah ko-eksistensi peradaban yang tidak dikenal sebagai masalah sebelum merangseknya proses globalisasi. Revolusi teknologi yang meledak di akhir abad ke-20 di satu sisi memang membawa banyak manfaat, dalam arti bahwa ia membuat banyak hal yang tadinya tidak mungkin, sekarang sudah menjadi kenyataan di bidang-bidang strategis seperti kedokteran, pertanian, transportasi, telekomunikasi, dan pertahanan. Ketika orang sedunia dapat menyaksikan di televisi, betapa para astronot melayang di angkasa luar, dalam tajuk berita yang sama mereka juga dapat menyaksikan dampak dari kekerasan, kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan di banyak bagian dunia. Semua ini ujung-ujungnya mengangkat masalah keadilan. Lalu dengan segera akan menjadi jelas juga, siapa yang hidup nikmat di dunia yang nyata ini, dan siapa yang sengsara serta sekadar mengharapkan kebahagiaan di alam yang akan datang. Krisis ini akan semakin diperparah oleh penyusutan sumber daya alam dan lebih lagi air bersih yang hanya dipertajam oleh pertumbuhan jumlah penduduk dunia miskin. Pertanyaan besar kita lantas menjadi begini: "Apakah mungkin umat manusia itu membangun ko-eksistensi damai antarperadaban dalam konstelasi dunia yang sarat dengan ketimpangan parah antara kemakmuran dan kesengsaraan?" Ulrich Beck, misalnya, mencatat bahwa hanya ada kira-kira 350 orang miliarder Dollar Amerika

13 Sigmund Freud, *Das Unbehagen in der Kultur* (Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2007), S. 135.

yang menikmati separuh PDB (*Gross Domestic Product*) dunia. Dunia sisanya dipenuhi oleh orang-orang miskin sampai sangat miskin yang 6,8 miliar jumlahnya.¹⁴

Perilaku saling intip antarkebudayaan ini baru merupakan awal dari cerita mengenai dampak teknologi terhadap *Lebenswelt* manusia. Persoalan yang lebih mendasar terjadi manakala tekno-sains membawa dampak mendobrak pemahaman mengenai kesadaran manusia. Filsafat dan psikologi selama ini hanya berteori mengenai kesadaran manusia dan akibat-akibatnya, karena kita hanya dapat mereka-reka mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam proses nalar. Freud hanya menggunakan metode psikoanalisis, alias *interview*, untuk membongkar alam bawah sadar dan sejarah seorang pasien. Namun tekno-sains (Gilbert Hottois, 1979) sekarang, terutama melalui piranti mikro-elektronik, telah memungkinkan para ahli untuk mengurai apa yang terjadi dalam proses kesadaran manusia, dan pada langkah berikutnya nanti juga merekayasa-sanya.¹⁵ Menurut hemat penulis, dengan teknik serupa itu, pada waktunya kita juga dapat mengatasi soal percaya atau tidak percaya yang dirumuskan oleh Freud dahulu. Aplikasi praktisnya yang positif akan dapat kita lihat, misalnya, dalam mengatasi konflik Palestina dan berbagai konflik stereotipikal dunia lainnya secara tuntas dan menyeluruh.

PENUTUP

Sejalan dengan pemikiran yang telah diuraikan di atas, revolusi teknologi – kecuali menaikkan ke permukaan banyak masalah yang tadinya tidak terlalu terasa sebagai masalah – sekarang dan di masa datang memungkinkan orang dapat melihat dan mendengar apa saja yang terjadi di bagian dunia lainnya secara cepat dan apa yang berproses dalam kesadaran para pemimpin politik, konglomerat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Transparansi mendasar ini akan memaksa para pemimpin dunia untuk menjadi lebih jujur dalam dialog untuk mencari jalan keluar

14 Ulrich Beck, *What is Globalization?* (Cambridge: Polity, 2003), p. 153.

bagi berbagai pertikaian di dunia. Dengan begitu dialog kebudayaan itu tidak dapat terlenu mubasir untuk sekadar “ditumbuh-kembangkan” pada tingkat dialog belaka, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk rumusan konsensual. Filosofi dengan begitu ditantang untuk menjadi lebih konkret dan kontributif dalam kerangka dialog global.

Di masa depan berbagai forum dunia akan dapat didayagunakan secara lebih efektif untuk melaksanakan dialog kebudayaan. PBB memang telah menjadi organisasi yang gembrot dan lamban, tetapi bagaimana pun juga badan itu masih tetap merupakan forum utama di mana berbagai rezim strategis dunia dibuat dalam bentuk pencapaian konvensi internasional. Pada giliran berikutnya, secara taktis berbagai konvensi itu akan harus diterjemahkan menjadi undang-undang dan peraturan pada tingkat nasional di segala penjuru dunia. Akhirnya, pada tingkat teknis, semua konvensi dan peraturan itu akan harus dilaksanakan oleh birokrasi di semua negara anggota PBB. Teranglah bahwa dalam kerangka pembangunan konsensus baru itu diperlukan semangat itikad baik dan lebih lagi kepercayaan dalam arti “*trust*” yang memungkinkan digelarnya “kebijakan-kebijakan sosial” baru dan spektrum kesejahteraan yang lebih luas.¹⁶

Dengan demikian, pluralitas kebudayaan tidak perlu disera-gamkan melainkan dibiarkan berproses sebagai realitas yang masuk akal belaka. Lebih bagus lagi, peradaban-peradaban yang unggul dan yang dalam keadaan naturalnya cenderung mendominasi lantas dapat kita jinakkan untuk hidup berdampingan secara damai. Untuk memper-tahankannya para pemimpin politik, militer, konglomerat, serta pemim-pin agama akan terus-menerus diharuskan untuk melaksanakan *kommunikatives Handeln* (tindakan komunikatif) model Jürgen Habermas (1929-....), dalam mana argumen yang lebih baik harus dikedepankan. Kendati demikian, supaya tatanan yang lebih manusiawi itu menjadi mungkin, absolutisme Freud mengenai percaya dan tidak percaya juga harus dibongkar dan

15 Lihat, misalnya, Mike Michael, *Technoscience and Everyday Life* (Berkshire: Open University Press, 2006). Untuk pencerahan ini penulis berterimakasih kepada Prof. Dr. Imam Buchori Zainuddin, ITB - Bandung.

diruntuhkan melalui penegakan aturan main yang mengharuskan dijalankannya toleransi antara yang percaya dan yang tidak percaya. Tanpa tesis baru yang boleh dibilang neo-Freudian atau bahkan anti-Freudian, kita akan terus-menerus berkubang dalam per-tengkarannya yang mustahil dan mubasir di antara berbagai cara pandang yang memutlakkan dan bermuara dalam absolutisme kekuasaan, absolutisme religi, absolutisme fatalis, dan berbagai absolutisme lainnya yang tidak akan membawa umat manusia ke dalam dunia yang lebih baik. Karena, seperti tulis Jimm Leffel, "People who believe in absolute truth are dangerous."¹⁷

DAFTAR RUJUKAN

- Beck, Ulrich. *What is Globalization?* Cambridge: Polity, 2003.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi Manusia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- _____. "Membangun Peradaban Yang Lebih Adil." *Melintas* 23 (April 2007): 29-45.
- Chen, Kuan-Hsing. "Civilizationalism." In *Theory, Culture & Society*. Volume 23. London: Sage Publications, 2006, pp. 427-428.
- Freud, Sigmund. *Das Unbehagen in der Kultur*. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2007.
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Simon & Schuster, 1996.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Athenian_democracy. Diakses pada 30 Maret 2011.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Imperialism>. Diakses pada 30 Maret 2011.
- <http://www.wdog.com/rider/writings/foucault.htm>. Diakses pada 30 Maret 2011.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1996.
- McCallum, Dennis, ed. *The Death of Truth*. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1996.

16 Francis Fukuyama, *Trust*, Chapter I, "On the Human Situation at the End of History," pp. 3-12

17 Jim Leffel, "Our New Challenge: Postmodernism," in *The Death of Truth*, edited by Dennis McCallum (Minneapolis: Bethany House Publishers, 1996), p. 31.

Michael, Mike. *Technoscience and Everyday Life*. Berkshire: Open University Press, 2006.

Robertson, Roland. "Civilization." In *Theory, Culture & Society*. Volume 23. London: Sage Publications, 2006, pp. 421-426.